



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Travel, alamat Jalan Pahlawan RT 013 RW 006, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer Kantor Bea Cukai Bagansiapiapi, alamat di Jalan Durian Gg. Keluarga RT 007 RW 003, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj, tanggal 2 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/10/IV/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Babussalam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Bagansiapiapi selama 15 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Bagansiapiapi selama 2 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak, lahir pada tanggal 26 Januari 2002;
 - b. Anak, lahir pada tanggal 21 Juni 2007;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah belanja yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan sejumlah uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Termohon;
 - b. Termohon sejak tahun 2017 sering mengatakan tidak mau tinggal lagi satu atap dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- c. Termohon sejak tahun 2017 sering mengatakan tidak merasa bahagia hidup bersama Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2018, ketika itu Termohon mengatakan tidak mau tinggal lagi satu atap dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon mengusir Pemohon dari rumah dengan membuang pakaian Pemohon keluar dari rumah dengan kata-kata kasar ;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon, hal ini sudah berjalan 6 bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Termohon sudah satu kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara *relas* panggilan Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dan hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor: 200/10/IV/2001 tertanggal 17 April 2001, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



B. Saksi :

1. **Saksi I**, dimana saksi sebagai abang angkat Pemohon sejak 4 tahun yang lalu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Ahmad Sofyan dan mengenal Termohon bernama Fitri Andrianika, istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah menjadi suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan di Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, dimana Saksi sebagai tetangga Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 5 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Ahmad Sofyan dan mengenal Termohon bernama Fitri Andrianika, istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perkebunan di Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan tetangga sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar Pemohon rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Majelis membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P. dan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti mana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 2001 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I adalah abang angkat Pemohon dan Saksi Saksi II adalah tetangga Pemohon, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi Saksi, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), syarat formal kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, Saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi Saksi II menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, Saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon dinilai telah memenuhi materi alat bukti karena kedua Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan para Saksi dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 April 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah berupa uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*azzawwaj al-maksuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis :

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافلما عدد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)